**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

 Kawasan kota pada umumnya merupakan pusat kegiatan ekonomi (perdagangan dan industri), pusat pemerintahan maupun pusat kegiatan budaya dan pariwisata. Dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi mengakibatkan pusat-pusat kota menjadi sasaran investasi atau penanaman modal masyarakat baik dalam skala besar maupun kecil (sektor informal).

 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat[[1]](#footnote-2).

 Permukiman kumuh menurut Johan Silas dapat diartikan menjadi 2 bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukkannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh. Dan yang kedua ialah kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkebangan kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh. Yang menjadi penyebabnya adalah mobilitas sosial ekonomi yang stagnan.

 Model penanggulangan permukiman kumuh dan liar dapat berwujud:

1. Program peremajaan kota (urban renewal)
2. Program perbaikan kampung (kampong improvement programme),
3. Rumah susun,
4. Relokasi (Resettlement),
5. Konsolidasi lahan (land consolidation),
6. Pembagian lahan (land sharing);
7. Pengembangan lahan terarah (guide land development),[[2]](#footnote-3).

 Kota Malang merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Perkembangan Kota Malang sangatlah pesat. Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Malang tidak terlepas dari masalah-masalah perkotaan umumnya. Masalah-masalah tersebut banyak yang terkait dengan permukiman yang masih banyak yanng belum terpenuhi untuk sarana maupun prasarana yang menunjang permukiman tersebut. Khususnya terlihat pada permukiman padat ataupun permukiman kumuh. Pengadaan permukiman secara swadaya ini tidak disertai dengan syarat-syarat teknik, kesehatan dan tata ruang, sehingga menyebabkan timbulnya permukiman kampung yang tidak teratur, kurang tertata dan cenderung menempati daerah konservasi yang mengakibatkan timbulnya permukiman kumuh (s*lum area*).

 Kota Lama merupakan salah satu kelurahan yang memiliki jumlah permukiman kumuh yang lumayan banyak. Hal tersebut dikarenakan dekatnya lokasi dengan pusat perekonomian seperti pasar besar yang juga ikut menImbulkan banyaknya aktivitas masyarakat sehingga menimbulkan banyak permukiman tak layak yang dibangun. Selain itu lokasi Kelurahan Kota Lama yang juga berada di bantaran Sungai Brantas. Banyak rumah-rumah yang dibangun saling berdekatan, namun terkadang tidak memikirkan tingkat kebersihan maupun kesehatan bagi masyarakatnya sendiri.

 Kelurahan Kota Lama telah memiliki Program Nasional yatu Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) adalah program lanjutan dari proses pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), mulai darimasyarakat berdaya – mandiri menuju masyarakat madani dimana Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum memberikan perhatian yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  khususnya peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

 Fokus dari program ini yaitu pada upaya penataan kawasan permukiman padat, kumuh dan miskin.

1. Latar Belakang PLPBK
2. Kondisi lingkungan permukiman yang buruk dan kumuh merupakan salah satu permasalahan kemiskinan;
3. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kegiatan penataanlingkungan permukiman di kawasan padat, kumuh, dan miskin;
4. Penataan kawasan lingkungan dilakukan dengan meningkatkan kualitas perumahan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat;
5. Pendekatan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas.
6. Prinsip-prinsip PLPBK
7. Komprehensif dan Terpadu
8. Berbasis Kawasan dan Komunitas
9. Kreatif dan Inovatif
10. Melembagakan Mekanisme Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas
11. Memperkuat Kemitraan dan Kolaborasi
12. Tujuan PLPBK
13. Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan perumahan, sarana dan prasarana.
14. Mewujudkan kemitraan masyarakat dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan kelompok peduli dalam pengelolaan penataan lingkungan pemukiman berdasarkan prinsiptata kelola pemerintahan yang baik.
15. Mewujudkan lingkungan permukiman yang teratur, aman, nyaman dan sehat dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin.
16. Mengintegrasikan proses dan hasil perencanaan penataan kawasan permukiman kumuh dan miskin yang disusun oleh masyarakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
17. Hasil yang diharapkan
18. Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran

Perencanaan kawasan prioritas *(mikro)* disebut Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). Fokus pada rencana penanganan/penataan kawasan padat, kumuh dan miskin. Dilengkapi rencana program investasi, skenario pentahapan pembangunan dan *Detailed Engineering Design* - DED. Strategi pemasaran memuat; rencana kerja, identifikasi calon mitra potensial, rencana event pemasaran dan strategi pelaksanaan kegiatan pemasaran.

1. Pranata

Aturan Bersama, adalah kesepakatan dari rangkaian rembug masyarakat yang menjadi ketentuan dan   aturan komunitas yang mengikat.  Lembaga pengelolaan pembangunan, yang dituju, adalah  Lembaga komunitas (BKM dan UPL) yang mengelola  Aturan Bersama. Lembaga pengelolaan pembangunan kelurahan yang dibentuk untuk pengelolaan, kawasan dan atau unit-unit bangunan fungsi ekonomi, seperti: koperasi, badan usaha milik warga, dibawah koordinasi dan pengendalian BKM/UPL, Lurah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan fisik
2. Kelurahan atau BKM yang diprioritaskan untuk mengelola PLPBK
3. Kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi (≥ 25%)
4. Kelurahan perkotaan yang memiliki kawasan permukiman padat, kumuh dan miskin
5. Kelurahan yang memiliki kinerja memadai yang ditandai dengan memiliki kinerja pembukuan sekretariat BKM/LKM minimum memadai dan pemilih dewasa dalam pemilu BKM/LKM di tingkat basis minimum 30%
6. Tidak ada kasus penyalahgunaan dana yang belum diselesaikan
7. Kelurahan padat, kumuh, dan miskin yang diprioritaskan penanganannya oleh pemerintah daerah
8. Tahapan Siklus PLPBK
9. Persiapan (Lokakarya, sosialisasi masal, Pengukuhan TPP menjadi TIPP)
10. Refleksi Perkara Kritis (RPK)
11. Pemetaan Swadaya (PS)
12. Perencanaan partisipatif dan Pemasaran (RPLP, Aturan Bersama dan RTPLP serta Strategi Pemasaran)
13. Pelaksanaan dan Pengelolaan Pembangunan
14. Evaluasi dan Keberlanjutan

**Rumusan Masalah**

 Berdasarkan gambaran yang telah dijelaskan dari latar belakang, maka muncul beberapa permasalahan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan permukiman kumuh yaitu Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang.

**Tujuan**

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan permukiman kumuh.

**Sasaran**

Sasaran untuk penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Karakteristik partisipasi masyarakat,
2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap Program PLPBK, sesuai dengan tangga dan derajat partisipasi Menurut Sherry Arstein pada Kampung Sumber Ringin ( RT 6 dan RT 9, RW 10 Kelurahan Kota Lama ).

**Ruang Lingkup Penelitian**

 Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi.

**Ruang Lingkup Lokasi**

 Lingkup lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Kampung Sumber Ringin (RT 6 dan RT 9) RW 10, Kelurahan Kota Lama. Kampung Sumber Ringin merupakan 2 RT di Kelurahan Kota Lama merupakan RT yang termasuk pada prioritas penanganan permukiman kumuh Kota Malang. Khususnya Program PLPBK yang sedang di jalankan pada lokasi penelitian sendiri.

Pemilihan lokasi ini dikarenakan adanya Program PLPBK sebagai program penanganan permukiman kumuh.

**Ruang Lingkup Materi**

Pembahasan pada ruang lingkup materi ini yaitu berkaitan dengan materi-materi yang terkait dalam penelitian ini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga nantinya dalam penyusunan laporan penelitian ini dapat terpenuhi dengan baik.

Menurut Johan Silas pemukiman kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan pemukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio pemukiman kumuh.

Materi yang akan digunakan salam penelitian ini yaitu mengenai permukiman kumuh dan Program PLPBK sebagai program penanganan permukiman kumuh. Akan dibahas juga secara detail tentang Program PLPBK, dan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Program PLPBK tersebut.

**Keluaran Yang Diharapkan**

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat terhadap Program PLPBK sebagai program penanganan permukiman kumuh. Untuk masalah ini yang akan dilakukan pertama kali yaitu melalukuan observasi lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran lokasi yang termasuk permukiman kumuh dan keberadaan Program PLPBK sendiri.

 Kampung kumuh memang selalu identik dengan keterbatasan prasarana dan sarana dalam bermukim. Adanya Program PLPBK diharapakan akan membantu masyarakat Kampung Sumber Ringin dalam masalah permukiman maupun sarana prasarana bermukim. Program PLPBK memiliki banyak program-program didalamnya. Masyarakat pun diikutsertakan dalam program-program tersebut. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Program PLPBK sendiri. Sehingga akhirnya akan teridentifikasi tingkat partisipasi masyarakat terhadap Program PLPBK sebagai program penanganan permukiman kumuh.

**Kegunaan Penelitian**

 Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

**Kegunaan Praktis**

 Kegunaan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Baik bagi masyarakat pada umumnya maupun jika nanti akan diteliti lebih jauh oleh pemerintah dan stakholder terkait, khususnya untuk pihak PLPBK.Untuk Kota Malang sendiri diharapkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah dan stakeholder untuk memperhatikan kelangsungan dan pelaksanaan Program PLPBK.

**Kegunaan Akademis**

 Kegunaan akademis ini menjelaskan manfaat maupun kegunaan yag nantinya ingin dicapai dari penelitian ini. Diharapkan akan menjadi referensi untuk melanjutkan tugas akhir yang terkait dengan masalah ini. Kegunaan akademis yaitu :

1. Teridentifikasinya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program PLPBK sebagai program penanganan permukiman kumuh.
2. Dapat dijadikan salah satu referensi untuk masalah permukiman kumuh pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Sistematika Pembahasan**

**Bab I Pendahuluan**

Bab Pendahuluan ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian dan ruang lingkup penelitian (lokasi dan materi), juga sitematika pembahasan dari laporan penelitian. Akan ddijelaskan pula keluaran yang diharapkan untuk penelitian, baik itu berhubungan dengan tujuan dan sasaran serta kegunaan setelah penelitian.

**Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab tinjauan pustaka ini akan menjelaskan tentang teori-teori maupun literatur yang digunakan dan juga akan mendukung penelitian.

**Bab III Metode Penelitian**

Bab metode penelitian akan membahas tentang metode yang akan digunakan untuk membantu penelitan dengan tahap pengumpulan data juga tahap pengolahan data pada penelitian.

**Bab IV Gambaran Umum**

Bab gambaran umum akan menjelaskan gamabaran umum lokasi penelitian maupun materi atau yang berhubungan dengan penelitian.

**Bab V Analisa**

Bab analisa menjelaskan kegunaan metode yang digunakan, baik itu dalam bentuk perhitungan maupun deskritif. Bab analisa akan menjadi hasil dari masalah yang dibahas, menggunakan metode yang sudah di tentukan untuk masalah yang dibahas.

**Bab VI Penutup**

Bab penutup berisi kesimpulan, saran juga rekomendasi peneliti. Bab penutup akan merangkum semua hasil pengerjaan dan memberikan rekomendasi untuk peneliti maupun pihak lainnya.

**Kerangka Pikir**

 Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang digunakan saling berhubungan dan juga akan menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang diambil dalam penelitian.

 Dalam penelitian ini, yang akan maka dilakukan pada awal yaitu mengetahui kondisi dari pemukiman kumuh pada lokasi penelitian serta program-program pengelolaan pemukiman kumuh yang ada pada lokasi penelitian. Setelah diketahui dua hal tersebut, nantinya akan diidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat terhadap program-program pengelolaan tersebut dan didukung dengan literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut.

 Metode yang akan digunakan juga nantinya diharapkan akan dapat membantu memecahkan masalah yang ada pada penelitian. Sehigga nantinya akan didaptkan solusi yang tepat untuk permasalahan pada penelitian.

**Peta Lokasi**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Kawasan Permukiman**

 Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

 Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan[[3]](#footnote-4).

**Permukiman**

 Pengertian permukiman secara rinci dapat di temukan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011. Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

 Menurut Doxiadis C.a,1974 (dalam Agus Warsono,2006) bahwa Permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia yang tujuannya untuk mempertahankan hidup secara lebih mudah dan lebih aman, dan mengandung kesempatan untuk pembangunan manusia seutuhnya.

 Dengan demikian pengertian permukiman dapat dirumuskan sebagai suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi, dan fisik tata ruang, dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial.

 Menurut Koestoer (dalam Agus Warsono, 2006) bahwa, wilayah permukiman di perkotaan yang sering disebut sebagai daerah perumahan, memiliki keteraturan bentuk secara fisik. Artinya, sebagian besar rumah menghadap secara teratur kearah kerangka jalan yang ada dan sebagian besar terdiri dari bangunan permanen, berdinding tembok, dan dilengkapi dengan penerangan listrik. Kerangka jalannya pun bertingkat mulai dari jalan raya, jalan penghubung hingga jalan lingkungan atau lokal.

 Bintarto (1979), menulis bahwa ketidakpuasan orang membincangkan pola pemukiman (settlements) secara deskriptif menimbulkan gagasan untuk membincangkannya secara kualitatif. Peter Haggett dalam Bintarto (1979) menyampaikan bahwa pola pemukiman yang dikatakan seragam (uniform), random, mengelompok (clustered) dan lain sebagainya dapat diberikan ukuran yang berifat kuantitatif. Pendekatan kuantitatif tersebut dilakukan dengan Analisis Tetangga Terdekat (nearest-neighbour analysis)[[4]](#footnote-5).

**Elemen Permukiman**

 Menurut Constantinos A. Doxiadis ada lima elemen dasar dari permukiman, yaitu[[5]](#footnote-6):

1. Nature (alam) yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah dan difungsikan semaksimal mungkin,
2. Man (manusia) baik pribadi maupun kelompok,
3. Society (masyarakat) bukan hanya kehidupan pribadi yang ada tapi juga hubungan sosoal masyarakat,
4. Shells (rumah) atau bangunan dimana didalamnya tinggal manusia dengan fungsinya masing-masing,
5. Networks (jaringan atau sarana prasarana) yaitu jaringan yang mendukung fungsi permukiman baik alami maupun buatan manusia seperti jalan lingkungan, pengadaan air bersih, listrik, drainase, dan lain-lain.

**Permukiman Kumuh**

 Menurut Johan Silas pemukiman kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan pemukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio pemukiman kumuh.

 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian[[6]](#footnote-7).

**Indikator Tingkat Kekumuhan**

 Indikator tingkat kekumuhan dilihat dari kemampuan sebuah kampung atau lokasi dalam memenuhi kriteria kampung baik dan tidak kumuh. Dari indikator yang telah ditentukan, akan ditentukan pula parameter pengamatan yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan.

 Indikator-indikator tersebut akan berhubungan dengan sarana prasarana maupun fasilitas-fasilitas yang ada di lokasi penelitian.

**Indikator & Parameter Kekumuhan**

|  |  |
| --- | --- |
| Indikator Kekumuhan | Parameter Kekumuhan |
| Kondisi Fisik Bangunan  | * Kondisi rumah yang non permanen
* Dinding dari triplek/ kayu
* Lantai bangunan dari tanah
 |
| Status Kepemilikan Rumah | Kontrak/ sewa ( masih milik orang lain) |
| Kondisi pencahayaan | * Ventilasi berukuran kecil
* Kurangnya jumlah ventilasi
* Tidak memiliki ventilasi, sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk ke rumah
 |
| Keadaan MCK yang buruk | * Kondisi closet yang sudah rusak
* Tidak memiliki closet untuk BAB dan BAK
* Masih membuang kotoran di sungai
 |
| Kondisi saluran air  | * Sering macet saat hujan
* Tidak memiliki drainase untuk air mengalir
* Banyak sampah yang membuat saluran mampet
 |
| Kondisi jalan lingkungan  | * Perkerasan jalan masih tanah
* Sering becek ketika hujan
 |
| Aliran listrik  | * Masih menumpang pada tetangga
* Belum teraliri oleh listrik
 |

 Indikator-indikator di atas akan disesuaikan pada kondisi lapangan lokasi penelitian. Akan di lihat bagaimana kesamaan dari indikator-indikator tersebut, di lihat pula dari parameter yang ada.

**Partisipasi Masyarakat**

**Partisipasi**

 Pengertian sederhana tentang partisipasi dalam hubungannya dengan pembangunan adalah mengambil bagian atau ikut berperan secara aktif dalam semua proses pelaksanaan pembangunan sesuai kemampuan.

 Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

**Masyarakat**

Secara teoritis, masyarakat merupakan segolongan manusia dalam keadaan berhubungan yang tetap atau agak tetap yang diorganisir untuk aktifitas-aktifitas bersamanya dan yang merasa terkait bersamanya[[7]](#footnote-8).

Menurut Paul B. Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/ kumpulan manusia tersebut[[8]](#footnote-9).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Ciri-ciri masyarakat Menurut Anderson dan Parker, yaitu :

1. Adanya sejumlah uang,
2. Tinggal dalam suatu daerah tertentu (ikatan Geografi),
3. Mengadakan atau mempunyai hubungan yang tetap/ teratur satu sama lainnya,
4. Sebagi aktifitas hubungan ini membentuk suatu sistem hubungan antar manusia,
5. Adanya keterikatan karena memiliki kepentingan bersama,
6. Mempunyai tujuan bersama dan bekerja bersama,
7. Adanya perasaan solidaritas, dan
8. Berdasarkan sistem yang terbentuk, akan membentuk norma-norma.

**Partisipasi Masyarakat**

 Partisipasi masyarakat (*public participation*) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang semakin penting di era otonomi daerah.

 Sementara Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi[[9]](#footnote-10).

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa pakar mengenai partisipasi masyarakat :

1. Jnanabroto Battacharyya (1972:20), mengartikan bahwa partisipasi merupaka pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.
2. Mubyarto (1984:35), mendefinisikan partispasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Keith Davis (1979:140), mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.

**Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat**

 Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

 Menurut Holil (dalam Isbandi, 2007:21) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain :

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
2. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.
3. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

**Tangga Partisipasi**

Sherry R. Arnstein (1995) membuat kategori penggolongan partisipasi masyarakat ke dalam delapan tingkatan, yang dikenal sebagai jenjang partisipasi masyarakat (*a ladder of citizen participation*). Ke delapan itu dibedakan dalam tiga kategori tipe yaitu : tidak ikut partisipasi (nonpaticipation); tingkat penghargaan atau formalitas (degres of tokenism); tingkat kekuatan masyarakat (degress of citizen power)[[10]](#footnote-11).

 Teori ini mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhiperubahan dalam membuat kebijakan. Terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci lag dalam delapan tangga partisipasi. Untuk lebih jelasnya ada pada gambar dibawah ini :

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Kendali warga**Derajat Kuasa Warga |
|  **7** | **Kuasa yang didelegasi**  |
|  **6** | **Kemitraan** |
| **5** | **Penentraman**Derajat Tanda Partisipasi |
|  **4** | **Konsultasi**  |
| **3** | **Pemberian informasi** |
| **2** | **Terapi**Non Partisipasi |
| **1** | **Manipulasi** |

**Tangga Partisipasi**

**Menurut Sherry Arnstein (1971)**

 Pada derajat yang terendah yaitu non partisipasi publik, ditandai dengan adanya manipulasi informasi dan kesan yang sering kali terjadi dalam kehidupan publik. Aktivitas partisipasi yang terjadi pada derajat ini sebenarnya merupaka distorsi partisipan dimana pemegang kuasa sekedar mendidik partisipan.

 Derajat partisipasi yang kedua adalah citizen participation (partisipasi masyarakat), dalam derajat ini partisipasi terjadi karena warga memiliki kuasa untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemerintah daerah.

 Pada derajat partisipasi yang tertinggi adalah citizen control (kendali warga), dalam derajat ini , warga memiliki kekuasaan untuk memerintah suatu program, wilayah, atau lembaga tertentu dengan derajat kemandirian yang kurang lebih sama dengan kemandirian pemerintah daerah. Derajat ini enunjukkan retribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang tertinggi yaitu kendali warga.

**Penggolongan Partisipasi Masyarakat**

**Menurut Sherry R. Arnstein (1969) – A Laddermof Citizen Partisipation**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenjang Partisipasi** | **Penggolongan** | **Keterangan** |
| Manipulation Therapy Informing | Tidak berpartisipasi atau ikut serta (nonparticipation) | Pada jenjang ini, masuarakat tidak mungkin membantu dan ikut serta dalam merencanakan atau melaksanakan program-program, tetapi hanya sebagai pihak pelengkap. Biasanya hanya sebagai legitimasi dari sebuah keputusan yang diambil |
| Informig Consultation Placation | Tingkat penghargaan atau formalitas (degrees of tokenism) | Anggota masyarakat boleh didengar dan harus didengar, akan tetapi mereka tidak punya kekuasaan, sehingga pandangan mereka kurang didengar ole pejabat. |
| Partnrship Delegated Power Citizen Power | Tingkat kekuatan masyarakat (degres of citizen power) | Pada jenjang ini masyarakat mampu bernegosiasi dan berhubungan dengan para pejabat serta mengambil keputusan. Pendapatnya serta kehendak masyarakat mampu mempengaruhi sebuah kebijakan. |

**METODE PENELITIAN**

**Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data dimaksudkan agar didapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan. Pengumpulan data dilakukan akan didapatkan dari data primer dan data sekunder.

 Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan yaitu data primer yang didapatkan dari kegiatan observasi/ pengamatan langsung pada lokasi penelitian, dengan membagikan kuesioner kepada mayarakat yang ada pada lokasi penelitian, sedangkan untuk mendapatkan data sekundernya diperoleh dari literatur-literatur yang ada.

**Data Primer**

 Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung pada lokasi penelitian.

1. **Observasi/ Pengamatan Langsung**

Observasi/ pengamatan merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan proses pengamatan. Data yang diperoleh merupakan data yang dikumpulkan pada saat kegiatan berlangsung. Beberapa data yang akan diperoleh antara lain :

1. Fisik bangunan, diantaranya jarak antar bangunan, ketinggian bangunan, bahan baku yang digunakan untuk bangunan , misalnya atap, dinding, laintai bangunan serta fungsi rumah untuk mengetahui kondisi bangunan.
2. Fisik lingkungan, diantaranya jenis sarana maupun prasarana pendukung yang terdapat pada kawasan penelitian untuk mengetahui kondisi lingkungan yang ada disekitar lokasi penelitian, misalnya fasilitas umum dan utilitas.
3. Karakteristik partisipasi masyarakat pada Kampung Sumber Ringin ( RT 6 dan RT 9).
4. Program pengelolaan permukiman kumuh yang ada di lokasi penelitian.
5. Partisipasi masyarakat terhadap program pengelolaan permukiman kumuh yang ada, dan bagaimana masyarakat mengelola program pengelolaan permukiman kumuh.
6. **Kuisioner**

Kuisioner merupakan cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuisioner) untuk responden pada lokasi studi.

Kuesioner dibagikan kepada masyarakat yang ada pada lokasi penelitian, yaitu kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Kota Lama. Berdasarkan sistem dan mekanisme

Dalam penelitian ini pembagian kuesioner bertujuan untuk membuat simpulan berupa prosentase mengenai bentuk dan motif partisipasi masyarakat, makan untuk menentukkan jumlah sample dihitung dengan rumus Slovin :

$$n=\frac{N}{N.d ^{2}+1}$$

 Keterangan :

N = Ukuran populasi

n = Ukuran sample

e = Galat pendugaan/persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel, batas kesalahan yang digunakan sebesar 10 % .

maka,

$$n=\frac{804}{804.(0,1) ^{2}+1}$$

$$n=\frac{804}{8,04+1}$$

$$n=88 responden$$

Maka didapat jumlah responden untuk Kampung Sumber Ringin yaitu 88 Responden.

**Penentuan Jumlah Populasi dan Sample**

 Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst. Sedangkan Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.

 Teknik penentuan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sample acak sederhana. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen[[11]](#footnote-12).

 Pada teknik acak ini , semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample, dimana populasi sample yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kota Lama.

**Metode Analisa**

**Metode Triangulasi**

Metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini menggunakan metode PRA dengan jenis metode triangulasi. Metode triangulasi yang akan digunakan yaitu trianguasi secara metode, yakni melalui kuisioner, observasi dan wawancara. Penggunaan Metode Statistik Deskriptif dengan penggunaan Metode PRA (Parrticipatory Rural Appraisal) dalam penelitian ini memiliki hubungan urutan pelaksanaan antar metode dalam penggunaannya pada penelitian ini.

**GAMBARAN UMUM**

**Pola Penggunaan Lahan**

 Kota lama merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kota Malang.kota Lama memiliki jumlah RW qzsebanyak 12 RW. Adapun batas administrasi dari Kelurahan Kota Lama, yaitu :

* Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Jodipan
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mergosono
* Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukoharjo
* Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kedungkandang

Jumlah penduduk Kelurahan Kota Lama pada tahun 2015, yaitu 28.812 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 9.223 KK.

**Jumlah Penduduk Kelurahan Kota Lama**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Laki-laki** | **Perempuan** |
| 2013 | 14.087 jiwa | 14.361 jiwa |
| 2014 | 14.158 jiwa | 14.418 jiwa |
| 2015 | 14.321 jiwa | 14.491 jiwa |

*Sumber : Data Monografi Kelurahan Kota Lama Tahun 2015*

**RW 10 Kelurahan Kota Lama**

Kawasan RW 10 merupakan salah satu RW yang berada pada Kelurahan Kota Lama. Kawasan RW 10 merupakan salah satu juga dari kawasan yang ada pada Kelurahan Kota Lama yang memiliki jumlah permukiman yang tergolong kumuh lebih banyak. Maka dari itu terdapat program Pemerintah yang ditujukan untuk kondisi permukiman kumuh.

Tidak semua kawasan RW 10 yang menjadi sasaran dari program tersebut, namun hanya RT 6 dan RT 9 saja yang memiliki tingkat kekumuhan lebih banyak daripada RT lainnya.

RT 6 maupun RT 9 memiliki kelerengan yang cukup tajam yaitu <45o. Akses masuk kawasan RT 6 dan RT 9 melalui jalan masuk utama Muharto gang 7. RT 6 memiliki jumlah KK (yang terdaftar) sebanyak 95 KK, sedangkan untuk RT 9 memiliki jumlah KK (yang terdaftar) sebanyak 102 KK.

**Kondisi Fisik dan Lingkungan Kampung Sumber Ringin**

**Kondisi Fisik Bangunan**

Kondisi fisik bangunan yang ada pada lokasi penelitian yaitu RT 6 maupun RT 9 memiliki jenis rumah yang permanen dan semi permanen. Khususnya pada RT 6 yang terkena bantuan Bedah Rumah dari Program PLBK sebagai Program Perbaikan Perumahan. Sebanyak 14 unit rumah yang diperbaiki hingga saat ini. Kondisi bangunan rumah pada RT 9 masih memiliki beberapa rumah jenis permanen dan sudah dalam kondisi baik.

**Kondisi Fisik Bangunan RT 6 & RT** 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kondisi Fisik Bangunan** | **RT 6** | **RT 9** |
| Baik | 15 | 24 |
| Sedang  | 20 | 7 |
| Buruk  | 9 | 13 |
| Sangat Buruk |  |  |

*Sumber : Hasil Rekapan Kuesioner*

**Kepadatan Bangunan**

Kepadatan bangunan pada RT 6 maupun RT 9 memiliki kepadatan dengan kategori padat. Antara satu rumah dan rumah lainnya saling berdekatan adapula yang bergandengan dengan rumah lainnya.



1. **Kepadatan Bangunan RT 6**

 ****

1. **Kepadatan Bangunan RT 9**

**Kepadatan Bangunan RT 6 & RT 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kepadatan Bangunan** | **RT 6** | **RT 9** |
| Sangat Padat |  |  |
| Padat  | 15 | 18 |
| Cukup Padat | 29 | 26 |
| Tidak Padat/ Jarang-jarang |  |  |

*Sumber : Hasil Rekapan Kuesioner*

Kepadatan bangunan yang terjadi dikarenakan bertambahnya jumah penduduk khususnya pada RT 6 dan RT 9, sehingga banyak dari warga menempati lahan permbangunan rumah RT lainnya. Ada beberapa warga yang tinggal pada RT lain namun terdaftar pada RT 6 maupun RT 9.

**Kualitas Bangunan**

Kualitas bangunan yang dimiliki rumah-rumah pada RT 6 memiliki kuliats bangunan yang cukup baik, dikarenakan banyak dari beberapa rumah yang seharusnya tidak layak huni.hampir semua rumah yang ada pada RT 6 menerima bantuan Bedah Rumah Untuk RT 9 sendiri juga memiliki beberapa rumah yang sudah tidak layak huni, dengan kondisi atap yang sudah mulai runtuh, dinding yang sudah hampir berlubang, dan kondisi lainnya.



1. **Kondisi salah satu rumah di RT 6**



1. **Kondisi salah satu rumah di RT 9**

**Status Kepemilikan**

Status kepemilikan lahan atau rumah yang dimiliki oleh warga RT 6 sebagian besar sudah merupakan rumah miliki sendiri sisanya kontrak atau sewa. Banyak juga dari warga sekitar yang memiliki rumah yang dikontrakan untuk warga lainnya. Untuk RT 9 hampir semua dari rumah-rumah tersebut sudah merupakan rumah kepemilikan sendiri.

**Status Kepemilikan Rumah RT 6 & RT 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Status Kepemilikan Rumah** | **RT 6** | **RT 9** |
| Sewa/Kontrak | 15 | 17 |
| Rumah Sendiri | 25 | 27 |
| Rumah Orang Tua | 4 |  |

*Sumber : Hasil Rekapan Kuesioner*

**Kondisi Lingkungan**

**Drainase**

 Permasalahan terkait dengan sistem drainase yang di alami oleh warga RT 6 yaitu :

1. Jaringan drainase yang dangkal dan rawan penyumbatan sampah,
2. Ada jaringan drainase yang berada di bawah bangunan rumah, sehingga membuat rumah tersebut terancam untuk dipindahkan.

Sedangkan untuk RT masalah drainase yang dialami yaitu :

1. Jaringan drainase dangkal dan rawan akan banjir,
2. Jaringan drainase dangkal dan rawan akan penyumbatan sampah,
3. Penyumbatan oleh sampah pada saluran drainase.

Jenis drainase baik RT 6 maupun RT 9 merupakan drainase terbuka dengan airan air yang lancar. Tidak pernah terjadi penyumbatan saluran drainase pada keadua RT ini.



1. **Jenis drainase pada RT 6**

**Limbah dan Persampahan**

 Persampahan yang ada pada RT 6 maupun RT 9 memiliki masalah yang sama. Masalah yang timbul yaitu penumpukkan sampah yang di sepanjang jalan menuju sugai, penumpukan sampah di saluran drainase yang tidak berfungsi, penumpukan sampah pada bibir sungai dan penumpukan sampah domestik di bantaran sungai.Pada kedua RT belum memiliki pengelolaan pembuangan sampah.

**Limbah & Persampahan pada RT 6 & RT 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Limbah & Persampahan** | **RT 6** | **RT 9** |
| Pembuangan di Rumah | - | - |
| Sungai  | 5 | - |
| TPS | 6 | 16 |
| Dikubur/ dibakar | - |  |
| Lainnya  | 37 | 28 |

*Sumber : Hasil Rekapan Kuesioner*

**Kondisi Jalan**

 Kondisi yang dimiliki oleh RT 6 maupun RT 9 memiliki kondisi yang sama. Aksesbilitas berupa tangga yang dibuat untuk mempermudah warga karena kondisi jalan lingkungan yang curam memiliki kecuraman dan juga licin juga tidak dilengakpi dengan pegangan pada kiri ataupun kanan tangga tersebut. Jalan lingkungan pada kedua RT ini menjadi area bermain anak karena anak-anak tidak memiliki ruang bermain yang cukup. Jenis jalan lingkungan yang ada pada RT 6 yaitu semen atau paving sedangkan pada RT 9 jenis aspal namun kondisiny buruk, sudah banyak aspal yang rusak sehingga banyak bagian jalan yang bolong.

**Kondisi Jalan Lingkungan pada RT 6 & RT 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkerasan Jalan Lingkungan** | **RT 6** | **RT 9** |
| Aspal  | - | - |
| Paving  | - | - |
| Tanah  | 7 | 6 |
| Semen  | 32 | 38 |
| Lainnya  | 5 | - |

*Sumber : Hasil Rekapan Kuesioner*



1. **Kondisi Jalan Lingkungan pada RT 6**



1. **Kondisi Jalan Lingkungan pada RT**

**Listrik**

Aliran listrik pada RT 6 hampir sebagian besar sudah memiliki listrik sendiri pada rumah masing-masing dan sudah menggunakan aliran listrik PLN. Namun, adapula yang masih menumpang pada rumah lainnya, karena rumah yang ditinggalinya merupakan rumah kontrak maupun belum memiliki biaya untuk menggunakan PLN. Untuk RT 9 hampir semua rumah sudah memiliki aliran listrik sendiri pada rumah-rumah mereka, walaupun masih ada warga yang menumpang pada tetangga.

**Aliran Listrik pada RT 6 & RT 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aliran Listrik** | **RT 6** | **RT 9** |
| Sambungan milik sendiri | 27 | 34 |
| Sambungan dari tetangga | 17 | 10 |

*Sumber : Hasil Rekapan Kuesioner*

**Air Bersih**

 Sumber air bersih yang didapatkan oleh warga RT 6 maupun RT 9 dari PDAM yang sudah hampir digunakan oleh warga kedua RT ini. Walaupun ada sebagian rumah yang masih menumpang pada warga lain, dengan alasan belum memiliki biaya dan tinggal pada rumah kontrakan warga lainnya.

 Sebagian rumah juga mendapatkan bantuan IPAL dari Program PLBK ini. Rumah-rumah yang mendapatkan bantuan IPAL ini merupakan rumah yang lokasinya berada dibawah dan sulit untuk di aliri PDAM.

 Untuk berlangganan PDAM, baik warga RT 6 maupun RT 9 setidaknya mengeluarkan biaya per bulannya sebesar Rp 50.000 – Rp 100.000 per bulan sesuai dengan penggunaan air setiap rumah.

**Sumber Air Bersih pada RT 6 & RT 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Air Bersih** | **RT 6** | **RT 9** |
| Langganan PDAM | 44 | 30 |
| Sumur  | - | - |
| Sumur Umum | - | - |
| Sumur Pompa | - | 14 |

*Sumber : Hasil Rekapan Kuesioner*



1. **Jenis kran air yang digunakan oleh warga RT 6 maupun RT 9**

**Sosial Ekonomi**

Sosial ekonomi merupakan salah satu vaiabel yang akan diamati dalam penelitian ini. Sosial ekonomi berkaitan dengan mata pencaharian atau pekerjaan yang ditekuni oleh warga RT 6 maupun RT 9 sebagai tujuan penelitian.

Mata pecaharian yang ditekuni oleh sebagian besar warga RT 6 merupakan pemulung, buruh bangunan, serabutan dan sebagiannya lagi merupakan swasta/ pedagang. Sedangkan pada RT 9 warganya sudah bermata pencaharian sebagai pedangang, namun hanya pada rumah masing-masing.

**Jenis Pekerjaan warga pada RT 6 & RT 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Pekerjaan** | **RT 6** | **RT 9** |
| PNS | 1 | - |
| Swasta  | 20 | 17 |
| Buruh  | - | 7 |
| Petani  | - | - |
| Pemulung  | 23 | 20 |

*Sumber : Hasil Rekapan Kuesioner*

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak terdapat pada pilihan pemulung dengan jumlah warga sebanyak 23 orang dari jumlah responden yang diwawancarai, sedangkan pada RT 9, jenis pekerjaan yang mendominasi adalah swasta.

**Program PLPBK**

Program PLPBK atau Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas merupakan program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) untuk tingkat kawasan/lingkungan permukiman dengan penekanan khusus pada penataan sarana-prasarana lingkungan dan kualitas hunian yang direncanakan dan dibangun ddengan pendekatan kolaborasi antara partisipasi masyarakat dan partisipasi pemda atau stakeholder lainnya.

Bagian-bagian dari Program PLPBK ini terdiri dari:

1. Kegiatan bedah rumah,
2. Pembuatan plengsengan untuk ruang terbuka hijau (sudah jalan dan dilaksanakan bulan Juni tahun 2014),
3. Warga juga diberikan bunga gratis agar merangsang masyarakat untuk memperindah lingkungan,
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) air mancur dan lainnya

Untuk Konsep Rancangannya sendiri, ada beberapa Program yang akan dilakukan, yaitu :

1. Rumah Sehat Layak Huni
2. Sarana Prasarana Air Bersih
3. Prasarana Sanitasi Air Kotor/ Limbah Domestik
4. Prasarana Drainase
5. Pengelolaan Sampah

Sebagian warga Kampung Sumber Ringin

1. Aksesbilitas Jalan Lingkungan yang aman dan nyaman
* Program Penerangan Jalan Umum,
* Perbaikan Kualitas Kenyamanan Jalan,
* Penghijauan Jalan Lingkungan,
* Perbaikan Keamanan Tangga, dan
* Pengadaan Area Parkir Bersama.
1. Revitalisasi Area Sumber Air

Indikasi Program PLPBK di Kampung Sumber Ringin merupakan skenario/ urutan pengembangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan jangka menengah. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan terus menerus untuk mencapai tujuan akhir penataan lingkungan permukiman Kampung Sumber Ringin. Waktu pelaksanaan pembangunan Kampung Sumber Ringin dalam Program PLPBK ini ditargetka selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2015 sampai 2019.

**Siklus Program PLPBK**

Siklus PLPBK adalah seluruh rangkaian kegiatan yang harus dan perlu dilakukan dalam melaksanakan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Mulai dari sosialisasi di tingkat kota/kabupaten melalui lokakarya kota/kabupaten dilanjutkan dengan sosialisasi masal sampai dengan tertatanya kembali kawasan permukiman miskin di lokasi prioritas.



**Keterangan :**

Minimum kesepakatan kesepakatan terhadap perkara‐perkara tersebut dibawah ini harus tercapai :

* Forum Konsultasi 1: Pembekalan rencana pembangunan makro kota dan penataan permukiman miskin
* Forum Konsultasi 2: Hasil PS dan Lokasi kawasan prioritas
* Forum Konsultasi 3: Hasil perencanaan partisipatif
* Forum Konsultasi 4: Pola kemitraan dan pendanaan
* Forum Konsultasi 5: Aturan main dan tata kelembagaan

**Komunitas pada Kampung Sumber Ringin**

Komunitas merupakan sebuah kelompok sosial yang menunjukkan adanya kesamaan kriteria sosial sebagai ciri khas keanggotaannya. Komunitas yang ada Kampung Sumber Ringin diantaranya, Kelompok ibu PKK, Pengajian untuk bapak-bapak dan arisan yang diikuti ibu-ibu.

**Usulan Komunitas untuk Kampung Sumber Ringin (RT 6 & RT 9)**

Komunitas yang ada pada Kampung Sumber Ringin sendiri jumlah nya masih sedikit, melihat ada beberapa masalah yang harus di koordinasioleh komunitas-komunitas pada Kampung tersebut.

1. Komunitas pengrajin sampah,

Tujuan adanya komunitas ini diharapkan dapat memanfaatkan sisa sampah seperti bungkus makanan, gelas plastik dan botol plastik yang dapat dijadikan barang kerajinan, seperti tas, payung, dompet dan barang kerajinan lainnya.

1. Komunitas pengelola Rumah Kompos,

Rumah kompos merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah sampah, namun saat ini rumah kompos sudah sudah tidak pernah digunakan lagi.

KSM merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat yang menaungi kegiatan maupun program PLPBK yang sudah. Sesuai Program yang sudah ada pada agenda Program PLPBK, KSM dibagi menjadi 9, yaitu :

1. KSM Bedah Rumah,
2. KSM Plengsengan,
3. KSM Ruang Terbuka Hijau,
4. KSM Jembatan dan Jalan tanjakan,
5. KSM Drainase,
6. KSM Sanitasi,
7. KSM Air Bersih,
8. KSM Penjagaan Sumber Air Bersih,dan
9. KSM Jalan Kampung .

Ketua maupun anggota KSM merupakan warga Kampung Sumber Ringin sendiri. Semua urusan teknis maupun non teknis yang berhubungan dengan program-program tersebut akan diurus oleh KSM-KSM terkait.

**Peran Masyarakat Sekitar Kampung Sumber Ringin**

Awalnya sosialisasi Program PLPBK diperuntukkan untuk seluruh warga RW 10, bukan hanya warga yang khusunya terkena Program PLPBK yaitu Kampung Sumber Ringin saja yang merupakan RT 6 dan RT 9 saja, namun untuk semua RT. Namun, warga RT lain hanya ikut pada salah satu kegiatan yag merupakan awal dari pengenalan Program PLPBK.

Program PLPBK sebenarnya diperuntukkan untuk seluruh warga RW 10, walaupun sangat dikhususkan untuk RT 6 dan RT 9 saja. Namun, tanpa diketahui sebabnya warga-warga tersebut enggan mengikuti kegiatan-kegiatan Program PLPBK tersebut, akhirnya yang mengikuti kegiatan-kegiatan Program PLPBK hanya warga RT 6 dan RT 9 saja.

**ANALISA**

**Analisa Karakteristik Partisipasi Masyarakat**

Analisa ini dilakukan dengan cara melihat langsung kondisi lapangan atau observasi langsung. Karakteristik partisipasi masyarakat di Kampung Sumber Ringin hampir sama dengan partisipasi masyarakat pada kampung lainnya. Setiap kegiatan atau acara yang ada di kampung selalu di ikuti oleh seluruh warganya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Kampung Sumber Ringin dilakukan di rumah-rumah warga sendiri seperti arisan, pengajian dan lainnya. Kegiatan lain pun ada yang dilakuka0n di Balai RW, seperti rapat maupun pertemuan-pertemuan yang melibatkan pihak pemerintah.

Karakteristik partisipasi masyarakat pada Kampung Sumber Ringin tidak memiliki perbedaan dengan kampung-kampung lainnya. Setiap kegiatan pun dilakukan secara rutin dan berkala. Kegiatan-kegiatan dilakukan setiap sore atau setelah magrib.

**Analisa Bentuk Partisipasi**

Berdasarkan hasil analisa, dapat dilihat bahwa warga Kampung Sumber Ringin memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan maupun pelaksanaan Program PLPBK ini. Hampir semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan Program PLPBK mengikutsertakan warga, begitu juga KSM sebagai bentuk adanya koordinasi untuk masing-masing program.

**Analisa Tingkat Partisipasi**

Berdasarkan hasil analisas, dapat dilihat bahwa tangga partisipasi yang ada pada Kampung Sumber Ringin yaitu penentraman, konsultasi dan pemberian informasi yang merupakan derajat kedua pada derajat partisipasi warga.

1. Penentraman yang ada pada Kampung Sumber Ringin, pemerintah juga stakeholder mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh warga dan juga pengurus. Dalam pertemuan tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, baik itu kritikan maupun saran.
2. Untuk tangga konsultasi, para warga mendapatkan kesempata untuk berkonsultasi baik dengan pemerintah dan stakeholder maupun para pengurus. Warga juga akan menerima hasil konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah beserta stakeholder yang nantinya akan dibicarakan kembali pada saat pertemuan.
3. Pemberian informasi, informasi yang didapatkan oleh para warga tersampaikan langsung pada warga. Baik itu informasi pertemuan maupun pelaksanaan kegiatan dari Program PLPBK. Informasi didapatkan langsung dari pihak pemerintah bersama stakeholder terkait maupun lewat pengurus Program PLPBK.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

**Bentuk Partisipasi Masyarakat Kampung Sumber Rigin**

Berdasarkan hasil analisa, kecendrungan bentuk partisipiasi yang ada di Kampung Sumber Ringin adalah jenis bentuk partisipasibuah pikiran dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut menandakan bahwa pada Kampung Sumber Ringin, warga ikut seeta dalam memberikan pendapat-pendapat yang bisa menjadi masukan maupun kritik untuk kelangsungan Program PLPBK yang sedang berjalan pada Kampung Sumber Ringin. Warga pun ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk pertemuan-pertemuan untuk program PLPBK sendiri.

 Pada kedua bentuk partisipasi yang pada Kampung Sumber Ringin dapat diketahui bahwa warga Kampung Sumber Ringin selalu ikut serta dalam kegiatan kampung khususnya kegiatan yang termasuk dalam Program PLPBK.

**Tangga dan Derajat Partisipasi Kampung Sumber Ringin**

 Hasil analisa untuk tangga dan derajat mana yang sesuia dengan lokasi penelitian yang merupakan Kampung Sumber Ringin yaitu berada pada tangga ke 3 sampai tangga ke 6. Ke enam tangga tersebut adalah pemberian informasi, konsultasi, dan penentraman. Keempat tangga tersebut masuk dalam derajat partisipasi kedua yaitu derajat partisipasi warga.

 Warga Kampung Sumber Ringin selalu ikut dalam kegiatan maupun pertemuan yang berasal dari program PLPBK. Informasi juga didapat oleh warga juga didapatkan dengan baik sesuai dengan koordinasi yang baik. Hubungan yang baik dengan pihak stakeholder dan para pengurus membuat para warga menjadi segan untuk mengikuti Program PLPBK ini.

**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kampung Sumber Ringin**

Dari urutan tangga dan derajat partisipasi Menurut Arstein di atas, maka inilah hasil dari kondisi di lapangan untuk Kampung Sumber Ringin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Derajat Partisipasi | Tangga Partisipasi | Karakter Kampung Sumber Ringin |
| Kuasa Warga | 8. Kendali warga |  |
| 7. Kuasa yang didelegasi |  |
| 6. Kemitraan |  |
| Partisipasi Warga | 5. Penentraman |  |
| 4. Konsultasi |  |
| 3. Pemberian informasi |  |
| Non Partisipasi | 2. Terapi |  |
| 1. Manipulasi  |  |

**Rekomendasi**

1. Rekomendasi dari penulis untuk peningkatan partisipasi warga pada Kampung Sumber Ringin yaitu :
2. Untuk mengingkatkan kebersamaan antara warga Kampug Sumber Ringin khususnya, perlu ditambah lagi organisasi sosial yang ada pada Kampung Sumber Ringin sendiri.
3. Untuk meningkatkan keinginan warga untuk memperhatikan lingkungan sekitar, agar lebih bai lagi.
4. Rekomendasi penulis untuk pihak perencana Program PLPBK
5. Keikutsertaan pihak terkait sangat penting untuk kelancaran kegiatan-kegiatan dalam Program PLPBK,
6. Dana yang dikeluarkan untuk Program PLPBK, diharapkan disesuaikan dengan kondisi lapangan, agar semua program yang direncanakan dapat teelaksana dengan baik dan tepat sesuai anggaran yang sesuai.
7. Rekomendasi untuk penelitian selanjutanya antara lain:
8. Studi lanjutan mengenai konsep pengembangan program-program PLPBK yag sudah dilaksanakan pada Kampung Sumber Rigin
9. Studi lanjutan mengenai pembentukan komunitas baru yang dapat membuat Kampung Sumber Ringin lebih berkembang
10. Studi lanjutan mengenai rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kampung Sumber Ringin.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Jurnal**

Deviyanti. Dea (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, eJournal Administrasi Negara,, eJournal Administrasi Negara, 1 (2): 380-394 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org hal. 382

Hamzah. Takdir, Baja. Sumbangan dan R. Barkey. Roland, Pola Perkembangan Permukiman Kota Merauke, hal. 6-8

Keterpaduan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2015 (direktorat Pengembangan Permuiman), hal.2

Nofiawaty. Hj., SE, MM, Hubungan Antara Faktor Penduduk setempat Terhadap Kecendrungan Preferensinya, hal.4

Silas. Johas (1996) .Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya dan Surabaya Post, 1996, hal.8

Soesilawati.Etty (2007). Kebijkan Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban”, Jurnal Ekonomi & Manajemen, Vol. 16,1, hal 09

Stein. Jay M. (ed). (1995) : Classic Readings in Urban Planning, New York : Mc Graw – Hill, 1995, hal.360-361

W. Sukandar (1996). Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan, Jakarta : PT.RG. persada, hal. 75

**Buku**

Kuswatojo. Tjuk dkk. (2005) Perumahan dan Permukiman di Indonesia: Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan Yang Berkelanjutan. ITB. Bandung : 2005. Hal.5

**Peraturan Perundangan**

Undang –Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, hal.3

1. Keterpaduan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2015 (direktorat Pengembangan Permuiman), hal.2 [↑](#footnote-ref-2)
2. Etty Soesilawati, 2007, “ Kebijkan Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban”, Jurnal Ekonomi & Manajemen, Vol. 16,1, hal 09 [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang –Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, hal.3 [↑](#footnote-ref-4)
4. Takdir Hamzah, Sumbangan Baja dan Roland R. Barkey, Pola Perkembangan Permukiman Kota Merauke, hal. 6-8 [↑](#footnote-ref-5)
5. Tjuk Kuswatojo dkk. Perumahan dan Permukiman di Indonesia: Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan Yang Berkelanjutan. ITB. Bandung : 2005. Hal.5 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid, hal. 4 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sukandar W, 1996, Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan, Jakarta : PT.RG. persada, hal. 75 [↑](#footnote-ref-8)
8. Hj. Nofiawaty, SE, MM, Hubungan Antara Faktor Penduduk setempat Terhadap Kecendrungan Preferensinya, hal.4 [↑](#footnote-ref-9)
9. Dea Deviyanti, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, 2013: 380-394, hal. 382 [↑](#footnote-ref-10)
10. Jay M. Stein (ed) : Classic Readings in Urban Planning, New York : Mc Graw – Hill, 1995, hal.360-361 [↑](#footnote-ref-11)
11. Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Penerbit alfabeta Bandung, cetakan ke-20, tahun 2014, hal.82 [↑](#footnote-ref-12)